

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI MAHEMBANG KECAMATAN KAKAS

Josie Geraldly Meray¹, Ir. Sonny Tilaar, MSi², Esli D. Takumansang, ST, MT³.

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado

^{2&3}Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK

Pantai Mahembang Kecamatan Kakas sebagai bagian dari Kabupaten Minahasa yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata baik untuk pasar wisata nusantara maupun mancanegara. Objek wisata ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk di kembangkan yaitu seperti pesona alam pantai yang sangat indah dengan pasir putih dan tekstur alam yang berbukit-bukit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggapan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisisioner, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat mempengaruhi bentuk dan tingkatan partisipasi yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut juga berkaitan dengan mata pencaharian dan tingkat pendidikan masyarakat, rendah tingginya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Dan untuk tanggapan masyarakat dilihat dari skala peran serta masyarakat yang didukung oleh peran pemerintah desa dan wisatawan, masyarakat menanggapi secara positif tentang adanya pengembangan kawasan objek wisata Pantai Mahembang dan juga dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar lokasi wisata tersebut. Sedangkan bentuk-bentuk dan tingkatan partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas meliputi : Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, buah pikiran, serta keterampilan dan kemahiran. Tingkatan partisipasi tersebut dapat dikategorikan dalam tingkat partisipasi insentif, inisiatif, dan interaktif.

Kata Kunci :Partisipasi Masyarakat, Pariwisata, Pengembangan, Pariwisata Berkelanjutan, Pantai Mahembang.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan yang kaya akan objek pariwisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat sejak pemerintah memutuskan untuk mengandalkan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar bagi Negara. Untuk memudahkan pengembangan pariwisata nasional, maka pemerintah mengambil langkah strategisdengan menyerahkan pembinaannya kepadaPemerintahDaerah Kabupaten/Kota agar lebih memudahkan pengembangan dan koordinasi pembangunan daerah. Salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Sulawesi Utara adalah Kabupaten Minahasa yang banyak memiliki potensi alam objek

wisata yang menarik salah satunya ialah KawasanObjek Wisata Pantai Mahembang. Pantai Mahembang sebagai bagian dari Kabupaten Minahasa yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisatabaik untuk pasar wisata nusantara maupun mancanegara. Objek Wisatayang terletak di Desa Mahembang Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Ini Mempunyai potensi sebagai objek wisata yang didukung oleh keberadaannya sebagai suatu kawasan yang memiliki potensi sangat besar, Yaitu Pesona alam pantai yang sangat indah dengan pasir putih dan tekstur alam yang berbukit-bukit.

Dalam usaha peningkatan pelayanan terhadap wisatawan tentu saja menjadi tanggung jawab bagi seluruh stakeholder pengembangan objek wisata

(pemerintah, pengusaha dari bidang pariwisata maupun masyarakat). Disinilah peran masyarakat belum terlalu optimal, masyarakat disekitar lokasi pariwisata sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar terutama dalam hal menjaga keberlanjutan keberadaan objek wisata tersebut. Pelibatan masyarakat secara aktif tentu saja akan memberikan nilai yang baik bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang.
2. Bagaimana Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk melakukan Identifikasi tanggapan masyarakat terhadap pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang dan Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan.

Dari berbagai partisipasi masyarakat banyak hal yang dapat diserap, diantaranya rasa kompetisi, rasa tanggung jawab dan solidaritas.

A. Oktami Dewi A. A. P Jurusan Antropologi, Makassar (2013, hal : 10) Ada berbagai tingkatan dan arti partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Partisipasi Manipulasi (*Manipulative Participation*)

Karakteristik dari model partisipasi ini adalah keanggotaan bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu.

- b. Partisipasi Pasif (*Passive Participation*)

Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi dari administrator tanpa mau mendengar respon dari rakyat tentang keputusan atau informasi tersebut.

Informasi yang disampaikan hanya untuk orang-orang luar yang profesional.

- c. Partisipasi Melalui Konsultasi (*Participation by Consultation*)

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses pengumpulan informasi, dan mengawasi analisa. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.

- d. Partisipasi Untuk Insentif (*Participation for Material Incentives*)

Partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Mungkin petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.

- e. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*)

Partisipasi dilihat dari lembaga eksternal sebagai suatu tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk menentukan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti itu mungkin cukup menarik, dan mereka juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi cenderung keputusan tersebut diambil setelah keputusan utama ditetapkan oleh orang luar desa atau dari luar komunitas rakyat desa yang bersangkutan.

- f. Partisipasi interaktif (*Interactive Participation*)

Partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk mencapai target proyek saja, tetapi melibatkan multi-disiplin metodologi dan ada proses belajar terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya yang digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada di lingkungannya.

- g. Partisipasi inisiatif (*Self-Mobilisation*)

Partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Hal ini dapat dikembangkan jika pemerintah dan LSM menyiapkan satu kerangka pemikiran untuk mendukung suatu kegiatan.

Pengertian Pariwisata

Menurut UU RI No.10 Tahun 2009, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Unsur-Unsur Pariwisata

Menurut Spillane dalam Sari (2011:45-47) ada lima unsur komponen pariwisata yang sangat penting, yaitu:

- a) *Attractions* (daya tarik) *Attractions* dapat digolongkan menjadi *site attractions* dan *event attractions*. *Site attractions* merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan *event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah.
- b) *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan) Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan.
- c) *Infrastructure* (infrastruktur) Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat

yang juga tinggal di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan.

- d) *Transportations* (transportasi) Dalam objek wisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.
- e) *Hospitality* (keramahtamahan) Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi.

Pelaku Pariwisata

Pelaku Pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik adalah :

1. Wisatawan

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik social, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.

2. Industri Pariwisata/Penyedia Jasa

Industri Pariwisata / Penyedia Jasa adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke dalam 2 golongan utama, yaitu :

- a. *Pelaku Langsung*, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain.
- b. *Pelaku Tidak Langsung*, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata,

misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata, dan sebagainya.

3. Pendukung Wisata

Pendukung Wisata adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk didalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya.

4. Pemerintah

Pemerintah adalah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam peraturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain dalam memainkan peran masing-masing.

5. Masyarakat Lokal

Masyarakat Lokal adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu pemeran penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap merupakan sumber daya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada ditangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata dan juga hampir sepenuhnya milik mereka.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan Non Government Organisation (NGO) yang sering melakukan aktivitas kemasyarakatan diberbagai bidang, termasuk bidang pariwisata.

Pengembangan Pariwisata

Menurut Sastrayuda (2010:6-7) mengemukakan dalam perencanaan pengembangan meliputi :

1. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata

diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.

2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

WTO mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial, keanakeragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Produk pariwisata berkelanjutan dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat dan budaya, sehingga mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan pariwisata. (Sharpley, 2000:10).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait,

media internet, dan literature melalui buku-buku pendukung terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

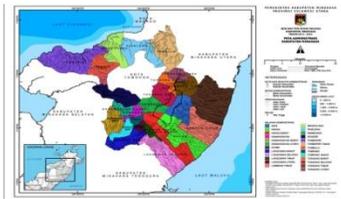
Lokasi Umum Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Mahembang Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.



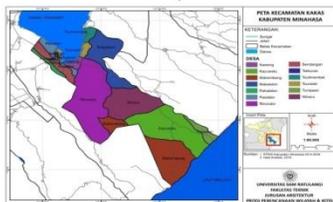
Gambar 1 Peta administrasi Sulawesi Utara

(Sumber : RTRW Sulawesi Utara)



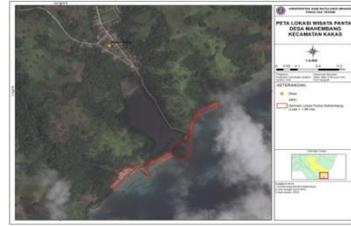
Gambar 2 Peta administrasi Kabupaten Minahasa

(Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa)



Gambar 3 Peta administrasi Kecamatan Kakas

(Sumber : BPS “Kecamatan Kakas Dalam Angka”)



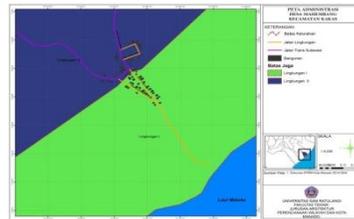
Gambar 4 Peta Lokasi Penelitian Wisata Pantai Mahembang

(Sumber : Hasil Analisis 2016)

Secara administratif desa mahembang terbagi atas 2 jaga/dusun, secara keseluruhan desa mahembang memiliki luas wilayah ± 488 Ha yang di dominasi oleh lahan pertanian.

Batas-batas wilayah administratif Kelurahan Desa Mahembang :

- Sebelah Utara : Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas
- Sebelah Timur : Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas
- Sebelah Selatan : Desa Bukit Tinggi Kecamatan Kakas Barat
- Sebelah Barat : Laut Maluku



Gambar 5 Peta administrasi Desa Mahembang Kecamatan Kakas

(Sumber : Hasil Analisis 2016)

Pembahasan

Identifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang

Untuk Mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang perlu diketahui dahulu informasi dan pemahaman masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang.

Informasi Masyarakat Yang Tahu Tentang Adanya Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang

Berdasarkan dari data hasil kuisioner yang telah disebar di Desa Mahembang terkait informasi yang tahu tentang adanya pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang menunjukkan bahwa sebanyak 30 orang responden dengan presentase 100% mengetahui tentang adanya pengembangan kawasan wisata tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari responden merupakan penduduk asli dari kawasan wisata Pantai Mahembang.

Pendapat Masyarakat Tentang Adanya Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang

Dari hasil yang didapat di lapangan berdasarkan hasil kuisioner menyatakan bahwa, sebanyak 20 orang responden dengan presentase 66,67% yang paling banyak beranggapan sangat baik dan sebanyak 10 orang responden dengan presentase 33,33% beranggapan baik tentang adanya pengembangan di kawasan wisata pantai mahembang.

Tabel 1. Tanggapan Masyarakat Tentang Adanya Pengembangan Kawasan Wisata Pantai

No	Tanggapan Tentang Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang	Responden	Presentase
1	Sangat Baik	20	66,67%
2	Baik	10	33,33%
3	Cukup Baik	-	0%
4	Tidak Baik	-	0%
Jumlah		30	100%

(Sumber : Hasil Analisis 2016)

Penilaian Wisatawan Terhadap Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang

Untuk melihat bagaimana frekuensi penilaian wisatawan terhadap kawasan wisata pantai mahembang, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. Frekuensi Penilaian Wisatawan Terhadap Kawasan Wisata Pantai Mahembang

No	Frekuensi Penilaian Terhadap Kawasan Wisata Pantai	Responden	Presentase
1	Sangat Senang	12	40,00%
2	Senang	17	56,67%
3	Kurang Senang	1	3,33%
4	Tidak Senang	-	0%
Jumlah		30	100%

(Sumber : Hasil Analisis 2016)

Hal tersebut juga berkaitan dengan hasil wawancara menurut salah seorang wisatawan yang berkunjung menyatakan *“Saya merasa sangat senang berkunjung di kawasan wisata ini karena pasir putuhnya yang indah dan keindahan pesona alam yang berbukit-bukit, selain itu juga masyarakatnya sangat baik dan ramah terhadap pengunjung”*

Dari hasil analisis berdasarkan data hasil kuisioner dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 56,67% dari 100% jumlah presentase mengaku Senang berkunjung di kawasan wisata pantai mahembang.

Kesan Wisatawan Terhadap Penerimaan Masyarakat

Berkaitan dengan penilaian responden terhadap kawasan wisata Pantai Mahembang, selanjutnya akan dianalisis mengenai kesan wisatawan yang berkunjung terhadap penerimaan masyarakat di kawasan wisata Pantai Mahembang.

Tabel 3. Kesan Wisatawan Terhadap Penerimaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Pantai Mahembang

No	Kesan Wisatawan Terhadap Penerimaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Pantai Mahembang	Responden	Presentase
1	Masyarakatnya Baik	25	83,33%
2	Masyarakatnya Tidak Peduli	-	0%
3	Masyarakatnya Kurang Baik	2	6,67%
4	Lainnya	3	10,00%
Jumlah		30	100%

(Sumber : Hasil Analisis 2016)

Analisis Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Analisis bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan

Partisipasi dalam perencanaan merupakan pelibatan masyarakat yang paling tinggi karena masyarakat turut serta dalam membuat keputusan. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat mutlak harus dilakukan dalam partisipasi dan bukan hanya keterlibatan mental semata, tetapi harus disertai dengan keterlibatan mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Masyarakat juga diberi kesempatan ikut serta untuk menyumbangkan

inisiatif dan kreatifitasnya.Sumbangan inisiatif dan kreatifitasnya dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan.

Berdasarkan dari hasil kuisioner yang telah disebar di lokasi penelitian bahwa bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang mulai dari memberikan usulan, memberikan kritik, memberikan saran, dan hanya mendengarkan saja. Dan dari 30 Responden yang memberikan usulan sebanyak 4 orang responden dengan presentase sebanyak 13,33%, yang memberikan kritik 3 orang responden dengan presentase 10,00%, yang memberikan saran sebanyak 5 orang responden dengan presentase 16,67%, dan yang hanya mendengarkan saja sebanyak 18 orang responden atau dengan presentase 60%.Jadi dapat dilihat bahwa responden responden yang dinyatakan ikut serta atau terlibat dalam kegiatan perencanaan pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang termasuk dalam bentuk partisipasi buah pikiran, dimana partisipasi yang diberikan berupa sumbangan buah pikiran atau inisiatif dan kreatifitasnya.

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengembangan di Kawasan Wisata Pantai Mahembang

Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Mahembang dalam Pelaksanaan Pengembangan di Kawasan Wisata Pantai Mahembang, bisa anda lihat pada table dibawah ini :

Tabel 4. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai

No	Partiipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengembangan	Responden	Presentase
1.	Penjaga Pintu Masuk	5	16.67%
2.	Petugas Keamanan Pantai	2	6.66%
3.	Petugas Parkir	5	16.67%
4.	Bakti Sosial	12	40.00%
5.	Usaha Berjualan/Warung	6	20.00%
JUMLAH		30	100%

(Sumber : Hasil Analisis 2016)



Gambar 6. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Mahembang(Sumber : Hasil observasi lapangan 2016)



Gambar 7. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang (Sumber : Hasil observasi lapangan 2016)

Dari hasil analisis beberapa variable yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat di Kawasan Wisata Pantai Mahembang dapat disimpulkan seperti adanya kemauan dari responden yang secara keseluruhan ikut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Mahembang yang dibuktikan dengan kesehariannya sebagai penjaga pintu masuk, petugas parkir, petugas keamanan pantai, serta kerja bakti ataupun pembangunan fasilitas penunjang yang ada di Kawasan Wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. Dilihat dari bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat setempat yang diberikan dalam bentuk tenaga, maka dapat disimpulkan partisipasi yang diberikan tersebut merupakan tingkat partisipasi *insentif*.

2. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, di tujuakan dengan adanya kemauan responden untuk usaha rumah makan dan kios kecil-kecilan yang menjual makanan dan minuman ringan. Jika dilihat dari partisipasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk keterampilan dan kemahiran, maka partisipasi tersebut dapat dikatakan dalam tingkat partisipasi *inisiatif*.

3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran, seperti yang ditunjukkan dengan keikutsertaan responden untuk mengikuti pertemuan sosialisasi, mulai dari perencanaan dan tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan panitia pengelola kawasan objek wisata terkait pengembangan kawasan objek wisata Pantai Mahembang. Maka partisipasi tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk tingkat partisipasi *interaktif*.

Bentuk Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang

Dari hasil wawancara dengan pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat desa mahembang tidak terlepas dari pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang. Bentuk peran pemerintah desa dalam memfasilitator masyarakat desa mahembang dapat dilihat dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan pemerintah desa dan dapat dilihat sebagai berikut : Apa yang di lakukan Pemerintah Desa dalam memfasilitator masyarakat Desa Mahembang guna Pengembangan Kawasan Objek Wisata Pantai Mahembang?

“Saya selaku kepala dusun yang mengatas namakan pemerintah desa mahembang, kami telah membentuk panitia pengelola objek wisata demi pengembangan kawasan wisata pantai mahembang, dan setiap bulannya kami pemerintah desa, panitia pengelola, dan tokoh-tokoh masyarakat mengadakan pertemuan/rapat demi membicarakan mengenai pengembangan objek wisata tersebut. Dan untuk mengenai dana pendapatan di lokasi objek wisata tersebut semuanya masuk di kas desa yang nantinya digunakan untuk

pembangunan/pengembangan objek wisata”



Gambar 8. Hasil Wawancara dengan Pemerintah Desa Mahembang
(Sumber : Hasil dokumentasi dilapangan 2016)

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di pantai mahembang kecamatan kakas, yang berdasarkan pada penyajian data, analisis data dan interpretasi data, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggapan Masyarakat di sekitar lokasi Kawasan Wisata Pantai Mahembang dapat dilihat dari pemahaman masyarakat terkait Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang yang menyatakan bahwa sebanyak 30 orang responden dengan prentase 100% menyadari dengan adanya Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan bagi masyarakat setempat karena sumber kawasan wisata tersebut dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di sekitar lokasi objek wisata/atau dengan kata lain masyarakat local.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat di Kawasan Wisata Pantai Mahembang dapat disimpulkan seperti adanya kemauan dari responden yang secara keseluruhan ikut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Mahembang yang dibuktikan dengan kesehariannya sebagai penjaga pintu masuk, petugas parkir, petugas keamanan pantai, serta kerja bakti ataupun pembangunan fasilitas penunjang yang ada di Kawasan Wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. Dilihat dari bentuk partisipasi yang dilakukan

masyarakat setempat yang diberikan dalam bentuk tenaga, maka dapat disimpulkan partisipasi yang diberikan tersebut merupakan tingkat partisipasi *insentif*.

3. Bentuk Partisipasi keterampilan dan kemahiran, di tujukan dengan adanya kemauan responden untuk usaha rumah makan dan kios kecil-kecilan yang menjual makanan dan minuman ringan. Jika dilihat dari partisipasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk keterampilan dan kemahiran, maka partisipasi tersebut dapat dikatakan dalam tingkat partisipasi *inisiatif*.

4. Bentuk Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran, seperti yang ditunjukkan dengan keikutsertaan responden untuk mengikuti pertemuan sosialisasi, mulai dari perencanaan dan tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan panitia pengelola kawasan objek wisata terkait pengembangan kawasan objek wisata Pantai Mahembang. Maka partisipasi tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk tingkat partisipasi *interaktif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Binarwan, Robby. 2008. “*Pengembangan Objek Wisata Di Kawasan Pantai Selatan Sukabumi*”. Jurnal Kepariwisata Indonesia Vol. 3 No. 1 Maret 2008.
- Hazrul Siregar. 2010. *Tinjauan Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pengembangan Kepariwisata Di Sumatera Utara (Studi kasus : Kota Medan)*. Jurnal Badan Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Oktami Dewi A. A. P. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi. Makassar Universitas Hasanuddin. 2013, hal : 10
- Sharpley. 2000. *Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*.
- Sinulingga. 2011. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Raja Berneh Doulu di Kabupaten Karo. Sumatera Utara*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2013. “*Metode Penelitian Manajemen*”. Alfabeta, Bandung
- Tunjung W. Suharso. 2009. *Perencanaan Objek Wisata dan Kawasan Pariwisata*. Malang : PPSUB.
- Yoeti. 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita, Bandung.
- Kebijakan Dan Peraturan Terkait :**
- BPS, 2014, “*Kecamatan Kakas Dalam Angka*”, Kabupaten Minahasa
- Depkes RI (2009). *Borupangggoroan.blogspot.com*. Diakses pukul 23.15. Tanggal 28 Juni 2016.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.9 Tahun 1969 Tentang *Pedoman Pembinaan Pengembang Kepariwisata Nasional*.
- Pemerintah RI “*Tentang Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*” (Agenda 21 Sektorial, 2000)
- RTRW, (2014 – 2034) Kabupaten Minahasa
- RTRW, Provinsi Sulawesi Utara
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 “*Tentang Kepariwisata*.” Pasal 19 ayat 2.